

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik warga Asem Bagus dan pengembang apartemen Gunawangsa Tidar belakangan ini muncul ke publik. Konflik ini mulai memanas ketika pengembang apartemen Gunawangsa melakukan pengecoran rangka jalan di atas sungai yang dulunya ditempati rumah warga Asem Bagus gang Pancasila. Pemkot Surabaya sebelumnya berencana melakukan normalisasi sungai dan meminta warga yang memiliki bangunan rumah di atas sungai mengosongkan tempat tinggalnya. Warga kemudian direlokasi ke Rusunawa Romokalisari oleh pemkot Surabaya. Mereka merasa pasrah serta mengikuti aturan dari pemkot Surabaya. Sejatinya, warga tidak merasa curiga ketika dilakukan pembersihan bangunan rumah yang menutupi sungai. Mereka sudah sejak lama bermukim diatas sungai tersebut, mulanya secara perlahan menempati lahan kosong yang termasuk tempat terlarang untuk tinggal. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan mahalnya harga lahan mendorong mereka menempati lahan tersebut. Warga merasa dibohongi karena tidak adanya sosialisasi mengenai pembangunan jalan akses tersebut. Sedangkan sosialisasi awal yang diberikan pemerintah Kelurahan Tembok Dukuh adalah tentang proyek normalisasi sungai yang berasal dari pemkot Surabaya.

Semakin berkembangnya kota Surabaya membuat para pengembang tertarik untuk membangun bisnis properti di Surabaya. Berdasarkan potensi usaha tersebut jumlah pembangunan apartemen di Surabaya pun semakin bertambah. Fenomena pembangunan hunian vertikal di Surabaya tidak luput dari permasalahan dan bahkan berujung dengan konflik maupun penolakan, hal tersebut mengingat terbatasnya lahan yang tersedia. Pembangunan apartemen dan hotel yang dilakukan di kota Surabaya banyak menimbulkan konflik antara masyarakat, pengembang dan

pemerintah. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penolakan pembangunan apartemen yang dibangun beberapa tahun belakangan. Kemudian kasus penolakan pembangunan apartemen di wilayah Surabaya yang muncul ke publik juga semakin bertambah dalam kurun waktu terakhir ini.

Penolakan warga atas pembangunan jalan akses apartemen berkaitan dengan bertambahnya kebutuhan hunian yang semakin sulit untuk didapatkan. Sementara itu ruang untuk permukiman yang dibutuhkan kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak banyak tersedia khususnya di Kota Surabaya. Ketegangan pun tidak dapat dihindari sehingga menimbulkan konflik. Banyak alasan yang mendasari penolakan warga terhadap pembangunan jalan akses apartemen Gunawangsa Tidar. Pada umumnya warga menolak karena permasalahan ancaman dampak ekologi berupa banjir, kemacetan, limbah rumah tangga dan pengalihan fungsi sungai. Selain ketidaksesuaian terhadap peruntukan lahan, mudahnya perizinan pemerintah Kota Surabaya terhadap pendirian apartemen juga menjadi salah satu pemicu konflik.

Melihat konflik antara warga Asem Bagus dan pengembang apartemen Gunawangsa Tidar di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, membuat peneliti semakin tertarik untuk mengkaji mengenai konflik pembangunan di perkotaan. Terlebih lagi, pembahasan mengenai konflik yang terjadi di perkotaan dapat dikonsepsikan sebagai sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional seperti yang diungkapkan oleh Lewis A. Coser. Teori konflik yang dikembangkan Coser merupakan refleksi dari pemikiran George Simmel. Bagi Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat bersifat positif. Oleh karena itu, konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Untuk mempermudah pemahaman dampak positif konflik Coser adalah dengan melihat dinamika hubungan antara “*in-group*” (kelompok dalam) dengan “*out-group*” (kelompok luar).

Lebih lanjut Coser menyatakan, fungsi konflik eksternal untuk memperkuat ikatan dalam kelompok internal untuk menciptakan musuh bersama agar dapat mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Realitas ini merupakan suatu proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Apa pun sumber konfliknya, anggapan terhadap ancaman yang bersifat realistis ataupun tidak membantu meningkatkan dan atau mempertahankan solidaritas internal. Selain itu musuh juga dapat berfungsi sebagai *kambing hitam* bagi kelompok tersebut. Ketegangan dalam suatu kelompok dapat dihindarkan agar tidak merusak hubungan kelompok apabila ketegangan itu diproyeksikan pada sumber yang ada di luar. Sehingga para anggota kelompok menyalahkan musuh luar karena kesulitan-kesulitan internalnya daripada mengabaikan kesulitan-kesulitan ini menciptakan perpecahan atau konflik dalam kelompok itu sendiri. Sebagaimana disebutkan diatas, dalam setiap masyarakat sering kali dikembangkan suatu mekanisme untuk meredakan ketegangan yang muncul, sehingga struktur sebagai keseluruhan tidak terancam keutuhannya. Mekanisme ini oleh Coser dinamakan *safety valve* atau katup pengaman (Wirawan, 2012:85).

Lebih lanjut lagi Susan (2019) menjelaskan tentang masyarakat yang disusun dari berbagai relasi antar manusia, antar kelompok dan antar negara yang tidak pernah terlepas dari kepentingan, penguasaan, permusuhan dan penindasan. Dalam sosiologi konflik, masyarakat disusun oleh berbagai relasi konflik. Konflik dapat bersifat destruktif ketika terdapat praktik kekerasan. Masing-masing kepentingan berkontestasi secara terus-menerus dengan jalan damai maupun kekerasan. Konflik dapat melahirkan kesedihan atau kesenangan, kebersamaan atau perceraian, serta kehancuran maupun pemecahan masalah.

Dalam hal ini, adanya realitas pembongkaran terhadap pagar pinggir sungai dan mulai dikerjakannya pengecoran jalan akses yang menurut warga akan digunakan oleh pihak pengembang apartemen. Tidak adanya sosialisasi akan hal tersebut membuat warga semakin marah sehingga memunculkan konflik. Menurut pendapat Burton (dalam Susan, 2012:12) pada dasarnya konflik bersumber dari kebutuhan dasar manusia. Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya yang tersedia secara sosial maupun lingkungan alam. Semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar yang diperjuangkan oleh pihak yang berkonflik, maka pemecahan masalah dapat dilakukan dengan sederhana dan cepat. Kompleksitas kebutuhan dasar manusia dalam konflik kepentingan berpengaruh pada lembaga pengelolaan konflik yang harus diciptakan dan dijalankan. Lebih lanjut Paul Wehr (2003) menjelaskan bahwa kompleksitas sumber konflik mendorong kelompok kepentingan melakukan mobilisasi sumber daya konflik. Sumber daya konflik adalah modal yang dimiliki kelompok kepentingan untuk memenangkan tujuannya dalam relasi konflik dengan kelompok lainnya. Mobilisasi sumber daya konflik hadir dalam bentuk strategi konflik yang bertujuan menguntungkan satu kelompok kepentingan.

Adapun studi yang berkaitan dengan konflik pembangunan perkotaan yang sudah pernah dilakukan, sebagaimana studi terdahulu yang dilakukan oleh Siti Aminah. Terdapat dinamika ekonomi-politik dalam praktik penataan kota di Surabaya. Pemerintah, pengembang (investor) dan masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi RTRW. Menurutnya, Pemkot Surabaya merupakan representasi dari sistem kapitalis yang mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan reproduksi ruang sosial ekonomi. Ruang di Kota Surabaya sebagai produk politik dan instrumen yang memungkinkan Kota Surabaya dapat berkembang. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas dominan (pengembang/investor/kapitalis) dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat (Aminah, 2015).

Studi ini menjelaskan bahwa pembangunan Kota Surabaya memiliki karakteristik interaktif antara investor/kapitalis (pengembang), negara (pemerintah) dan masyarakat. Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik pembangunan kota tidak dapat dihindari. Praktik pembangunan apartemen tidak pernah terbebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang. Keberpihakan atau ketidaknetralan tersebut tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan Pemkot Surabaya berupa pemberian izin pengelolaan lahan kepada pengembang serta pembebasan lahan. Sedangkan masyarakat yang

tergusur oleh pengembang karena lahannya dikenai proyek pembangunan menjadi sebuah kombinasi problematika yang muncul dalam hal pembangunan di kota.

Kemudian dalam studi lainnya di Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta oleh Kreshna Manggala Putra. Memaparkan secara lokal di Padukuhan Karangwuni terdapat 3 kelompok Elit yang berseteru antar sesamanya. Yakni antara elit dusun (Kepala Dukuh, RT / RW) sebagai perangkat pelayan warga, kelompok gerakan Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan (PWKPP) sebagai bagian kelompok yang mendukung pembangunan apartemen dengan elit massa yang terorganisir dalam kelompok Penolakan Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU). Perseteruan antar kelompok elit ini mewujudkan adanya kontestasi konflik antar elit dalam proses pembangunan Apartemen Utara. Konflik perkotaan yang menghasilkan adanya konflik antar pemerintah, pengembang dengan masyarakat mencerminkan bahwasannya dimensi lokal kerap melahirkan berbagai kompleksitas hubungan konflik antar elit di dalamnya. Permasalahan lokalitas juga memiliki posisi sebagai jaminan keberlanjutan pembangunan dan keutuhan warga, sehingga permasalahan yang hadir dan berkembang secara lokal turut dijalin dengan seimbang guna menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis (Putra, 2016).

Studi tentang konflik antara pengembang (investor) dan masyarakat menjadi menarik, terlebih karena pemerintah tidak dapat bersikap netral. Konflik dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara partisipan konflik. Setelah membaca beberapa penelitian terdahulu, peneliti mencoba mencari celah dari penelitian tersebut. Pihak pengembang apartemen ditengarai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan akses yang memicu konflik dengan warga Asem Bagus. Skripsi ini berfokus pada konflik warga Asem Bagus dan Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya. Konflik ini melibatkan pihak pengembang apartemen dan warga Asem Bagus gang Pancasila sebagai wilayah ring-I. Meskipun ada keterlibatan warga dari RT lain untuk menolak pembangunan jalan akses, akan tetapi gerakan perlawanan digagas oleh warga Asem Bagus gang Pancasila.

## 1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Siapa saja yang menjadi partisipan konflik?
- 1.2.2 Bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan jalan akses ini mengkonstruksikan kepentingan mereka?
- 1.2.3 Hal apa sajakah yang menghalangi mereka untuk menemui kesepakatan bersama yang diterima semua?
- 1.2.4 Bagaimana konflik ini mempengaruhi partisipan konflik?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

- 1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang menjadi partisipan konflik.
- 1.3.2 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan jalan akses ini mengkonstruksikan kepentingan mereka.
- 1.3.3 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menghalangi pihak berkonflik dalam menemui kesepakatan yang dapat diterima bersama.
- 1.3.4 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konflik ini mempengaruhi partisipan konflik.
- 1.3.5 Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi penilaian Tugas Akhir Mahasiswa, Mata Kuliah : *Skripsi*, sebagai Pra-syarat untuk memperoleh gelar tingkat Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (UNAIR)

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, yaitu berupa informasi dan pemahaman tentang konflik sosial di daerah perkotaan dalam konteks pembangunan dan perencanaan kota. Sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan terutama dalam kajian ilmu sosial serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi informasi bagi pembaca agar dapat memperdalam pemahaman tentang unsur-unsur, sumber-sumber kepentingan dan struktur yang tidak seimbang dalam isu-isu konflik. Dengan demikian, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sudut pandang untuk pemerintah dalam membuat kebijakan tentang resolusi konflik pembangunan di perkotaan yang bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan untuk semua pihak.

## 1.5 Diskursus Teoritik

### 1.5.1 Studi Terdahulu

Studi mengenai konflik memang telah banyak dilakukan, beberapa diantaranya diharapkan menjadi acuan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu konflik warga Asem Bagus dengan Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya. *Pertama*, Doddy Prayogo telah melakukan studi yang berjudul *Anatomi Konflik antara Korporasi dan Komunitas Lokal pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Dalam studi tersebut dijelaskan relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang, minyak, dan gas yang mengalami banyak perubahan sejak reformasi politik (1998) dan

digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (1999 dan 2004). Dengan adanya perubahan ini menimbulkan maraknya peristiwa konflik yang terjadi di hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas. Anatomi konflik secara analitik dapat dipetakan dalam tiga dimensi, yakni dimensi sebab, dinamika, dan resolusi konflik. Kasus konflik antara korporasi dengan komunitas lokal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menunjukkan adanya pola berkenaan dengan signifikan-tidaknya sebab konflik, tinggi-rendahnya dinamika konflik, signifikan-tidaknya resolusi konflik, dan secara keseluruhan menunjukkan tiga dimensi konflik ini saling berhubungan dalam proses konflik. Berangkat dari studi ini, peneliti mencoba menelusuri lebih lanjut studi-studi terkait konflik antara korporasi dan masyarakat khususnya di daerah perkotaan (Prayogo, 2010).

*Kedua*, Siti Aminah pada tahun 2015 telah melakukan studi yang berkaitan dengan konflik pembangunan perkotaan. Studi ini berjudul *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya*. Dalam studi ini, Aminah memaparkan tentang dinamika ekonomi-politik dalam praktik penataan kota di Surabaya. Aktor yang mewakili pemerintah, pengembang (investor) dan masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi RTRW. Studi ini menjelaskan bahwa pembangunan Kota Surabaya memiliki karakteristik interaktif antara investor/kapitalis (pengembang), negara (pemerintah) dan masyarakat. Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik pembangunan kota tidak dapat dihindari. Menurutnya, pemkot Surabaya merupakan representasi dari sistem kapitalis mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan reproduksi ruang sosial ekonomi. Praktik pembangunan apartemen tidak pernah terbebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang. Keberpihakan atau ketidaknetralan tersebut tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan pemkot Surabaya berupa pemberian ijin pengelolaan kepada pengembang dan pembebasan lahan, pengembang yang melakukan pembangunan fisiknya dan masyarakat yang tergusur oleh pengembang karena lahannya dikenai proyek



pembangunan menjadi sebuah kombinasi problematika yang muncul dalam hal pembangunan di kota. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas dominan (pengembang/investor/kapitalis) dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat (Aminah, 2015).

*Ketiga*, Kreshna Manggala Putra dalam studi lainnya di Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta yang berjudul *Konflik Elit Lokal dalam Pembangunan Apartemen Utara di Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta* memaparkan secara lokal di Padukuhan Karangwuni terdapat tiga kelompok Elit yang berseteru antar sesamanya. Yakni antara elit dusun (Kepala Dukuh, RT / RW) sebagai perangkat pelayan warga, kelompok gerakan Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan (PWKPP) sebagai bagian kelompok yang mendukung pembangunan apartemen dengan elit massa yang terorganisir dalam kelompok Penolakan Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU). Perseteruan antar kelompok elit ini mewujudkan adanya kontestasi konflik antar elit dalam proses pembangunan Apartemen Utara. Konflik perkotaan yang menghasilkan adanya konflik antar pemerintah, pengembang dengan masyarakat mencerminkan bahwasannya dimensi lokal kerap melahirkan berbagai kompleksitas hubungan konflik antar elit didalamnya. Permasalahan lokalitas juga memiliki posisi sebagai jaminan keberlanjutan pembangunan dan keutuhan warga, sehingga permasalahan yang hadir dan berkembang secara lokal turut dijalin dengan seimbang guna menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis (Putra, 2016).

*Keempat*, satu tahun kemudian, Savonda Rizky Komorina dan Diyah Utami melakukan sebuah kajian tentang resistensi masyarakat terhadap pembangunan apartemen dan mal. Dalam studi yang berjudul *Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Tentang Rencana Pembangunan Apartemen Dan Mall* dijelaskan bahwa rencana pembangunan apartemen dan mall yang tidak disambut baik oleh masyarakat Gunung Anyar. Masyarakat bersikap resisten terhadap rencana

pembangunan tersebut karena nantinya akan lebih banyak membawa dampak negatif. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk melakukan gerakan resistensi, antara lain resistensi secara terbuka dan resistensi secara terselubung. Sikap resisten tersebut menimbulkan konflik yang vertikal, dimana konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar elit (investor dan pemerintah) dan masyarakat. Konflik ini disebabkan ketidaksepakatan antara warga pemilik tanah dan pengembang mall dan apartemen. Mereka adalah warga terdampak yang berada di wilayah RW 02 dan RW 07 Gunung Anyar (Komorina dan Utami, 2017).

*Kelima*, pada tahun yang sama, Fahmi Huda dalam studinya yang berjudul *Konflik Air Antara Warga dan Hotel Fave di Kampung Miliran Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulhrajo Yogyakarta* menjelaskan tentang konflik terhadap persaingan memenangkan sumber. Konflik tersebut berawal dari kekeringan yang dialami warga Kampung Miliran. Mereka menduga kekeringan terjadi akibat dari beroperasinya sumur milik Hotel Fave. Sebaliknya, Hotel Fave mengklaim kekeringan tersebut akibat dari faktor musim kemarau. Dalam penyelesaian konflik air tersebut, hadirnya pemerintah desa dan kecamatan berhasil memfasilitasi rekonsiliasi kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan. Konflik tersebut diakhiri dengan penutupan sumur dalam milik Hotel Fave. Penutupan sumur tersebut dilakukan karena Hotel Fave tidak memiliki ijin pemanfaatan air tanah, selain itu pemberian kompensasi sebesar 75% penggantian biaya suntik sumur yang dilakukan warga (Huda, 2017).

Beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan memang sudah banyak membahas tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat, namun pada masing-masing penelitian terdapat perbedaan tidak hanya dari segi lokasi melainkan juga fokus dan permasalahan penelitian, perspektif, teori yang digunakan dan metode penelitian. Tujuan dari studi terdahulu adalah untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh

penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin mengisi kekosongan pada studi terdahulu melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan pemikiran Lewis A. Coser tentang fungsi positif konflik dalam rangka memahami fenomena konflik di wilayah Asem Bagus. Peneliti juga menjelaskan dinamika konflik serta upaya yang dilakukan partisipan konflik untuk menyelesaikan konflik.

### 1.5.2 Kerangka Teori

Berbicara mengenai konflik di wilayah Asem Bagus Kelurahan Tembok Dukuh, maka teori fungsi positif konflik yang dikemukakan Lewis A. Coser dirasa peneliti sangat relevan dengan pembahasan ini. Coser membedakan dua tipe dasar konflik, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik berasal dari perebutan sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Konflik semacam ini akan lebih mudah teratasi apabila sumber yang diperebutkan tersebut telah didapatkan tanpa adanya perkelahian. Sedangkan konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik semacam ini dapat ditemui dalam konflik antar agama, antar etnis dan konflik kepercayaan lainnya (Susan, 2019:44).

Dalam analisis konfliknya, Coser merefleksikan pemikiran George Simmel. Simmel melihat dalam kehidupan sosial, bahwa individu tidak hanya mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi bersemangat untuk berkonflik. Jika tidak ada isu-isu penting, orang mau berkonflik karena isu kecil atau sepele. Simmel membedakan antara konflik orang per orang secara langsung dan persaingan. Hubungan intim yang cukup kuat memungkinkan percekocokan atau malah untuk hidup bersama, sehingga intensitas konflik seringkali berbanding langsung dengan tingkat solidaritas sosial. Menurutnya, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang dasar, sehingga proses konflik berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam berbagai cara yang tidak terhitung jumlah dan bersifat kompleks.

Coser tidak banyak menaruh perhatian pada hubungan timbal balik yang kompleks dan tidak kentara antara bentuk-bentuk konflik dan interaksi lainnya pada tingkat antar pribadi, tetapi lebih menyoroti pada konsekuensi-konsekuensi yang timbul bagi sistem sosial yang lebih besar dimana konflik tersebut terjadi. Coser bermaksud menunjukkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat “disfungsional” bagi sistem yang bersangkutan. Konflik bisa juga menimbulkan konsekuensi positif, sehingga bisa bersifat menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka. Lebih lanjut Coser juga menyatakan, konflik merupakan unsur interaksi yang penting dan tidak bisa dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik, memecah belah atau merusak. Konflik dapat menyumbang kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antara anggotanya (Wirawan, 2012).

Bagi Coser, konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah hal-hal yang menyangkut dinamika hubungan antara “*in-group*” (kelompok dalam) dengan “*out-group*” (kelompok luar). Berikut adalah beberapa proposisi yang dikemukakan olehnya:

1. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
2. Integrasi yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya dalam

kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.

3. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas.
4. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi; kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka mungkin diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
5. Sebaliknya apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi. Umumnya individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.

Pemikiran Lewis Coser mengenai hubungan antara kelompok dalam dan kelompok luar memang memiliki kemiripan dengan George Simmel. Salah satu proposisi Simmel yang menggambarkan tentang fungsi positif konflik luar bagi kelompok dalam adalah: "*Conflict with other groups contributes to establishment and reaffirmation of the identity of the group and maintains its boundaries against the surrounding social world*" (Coser, 1964:38)

Coser mengakui bahwa konflik itu memang dapat membahayakan persatuan, oleh karena itu perlu dikembangkan cara agar bahaya tersebut dapat dikurangi bahkan dapat diredam. Bagi Coser, katup pengaman ini sebagai institusi (*safety valve institution*). Sehubungan dengan konflik warga Asem Bagus, Coser mengisyaratkan bahwa semua elemen yang terdapat dalam institusi sosial harus terdapat pula di dalam katup pengaman ini. Katup pengaman ini di samping dapat berbentuk institusi sosial dapat juga berbentuk

tindakan-tindakan atau kebiasaan yang dapat mengurangi ketegangan, karena konflik tidak dapat tersalurkan. Konflik fungsional Coser melihat bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi, sedangkan ungkapan perasaan permusuhan tidaklah demikian. Fungsionalisme konflik membicarakan tentang konflik disfungsional bagi struktur sosial ketika terdapat toleransi atau tidak terdapat konflik. Yang mengancam kondisi pecah belah bukanlah konflik, melainkan kekacauan struktur itu sendiri yang mendorong adanya permusuhan yang terakumulasi dan tertuju pada pokok perpecahan yang dapat meledakkan konflik (Wirawan, 2012).

Lebih lanjut Sparringa (2019) menjelaskan bahwa konflik yang tidak terkendali dan berkepanjangan dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang bertikai. Konflik yang tidak terkendali memboroskan sumber. Baik pemenang maupun yang dikalahkan tidak dapat mengelak dari kerugian. Semua membayar karena konflik memang berongkos. Selain itu, konflik yang berkepanjangan dapat memperluas dan memperdalam isu konflik. Dengan kata lain, konflik yang berkepanjangan cenderung menggandakan dirinya sendiri. Semakin lamanya waktu yang dipakai untuk sebuah konflik berhubungan sejajar dengan muncul dan berkembangnya tema-tema baru. Artinya, konflik akan berakhir apabila salah satu partisipan telah kehabisan sumber-sumbernya.

Pada bagian lain, lemahnya fungsi-fungsi kelembagaan negara juga menjadikan keadaan yang memperburuk konflik. Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk menjadi mediator dan bahkan arbitrator konflik. Akibatnya masyarakat menempuh penyelesaian konflik menurut cara-cara yang mereka percaya paling menguntungkan bagi mereka, termasuk di antaranya adalah penggunaan kekerasan. Partisipan konflik memiliki perbedaan dalam melihat aspek-aspek konflik, meliputi sumber konflik, cara penyelesaian konflik dan tujuan akhir konflik. Oleh karena itu, bagian terpenting dalam penyelesaian konflik adalah mempertemukan cara pandang yang sama terhadap ketiga hal tersebut.

Meskipun demikian, konflik juga memiliki fungsi yang dapat menghasilkan asosiasi, koalisi dan solidaritas internal. Konflik juga mengarah pada pembentukan asosiasi dan koalisi antara partisipan konflik yang sebelumnya tidak terikat. Beberapa pihak yang memiliki lawan yang sama akan memiliki ikatan yang berkembang diantara mereka. Konflik juga membantu proses sentralisasi kekuasaan di masing-masing kelompok yang bertikai.

Untuk menjelaskan bagaimana proses konflik yang terjadi dalam konflik warga Asem Bagus, menurut Novri Susan (2019) dalam buku Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis, teori konflik muncul sebagai respon dari demokratisasi dan industrialisasi yang sedang berkembang pesat. Teori konflik merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Sosiologi konflik mengikuti tiga mazhab besar dalam ilmu sosial, yaitu sosiologi konflik positivis, sosiologi konflik humanis dan sosiologi konflik kritik. Dalam perkembangan sosiologi konflik juga melahirkan perspektif konflik eklektik dan juga studi konflik multidisipliner.

Pemetaan konflik memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher (2001) dalam Susan (2019:72), pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak yang sedang berkonflik. Pemetaan konflik dapat digunakan sebagai penggambaran grafis sebuah konflik dengan menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Setiap orang yang berkonflik tentunya memiliki perbedaan pandangan dalam memahami keadaan mereka, kemudian mereka akan saling menyampaikan pandangan masing-masing.

Wehr dan Bartos (2003) dalam Susan (2019:73) memberikan teknik pemetaan konflik sebagai berikut:

1. *Specify the Context*, yaitu menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik.

2. *Identify the parties*, yaitu menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak berkonflik. Pihak utama berkonflik adalah mereka yang menggunakan perilaku dan tindakan koersif dan memiliki kepentingan dari hasil konflik. Pihak konflik sekunder memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil konflik. Pihak ketiga adalah aktor yang netral dan bersedia mendorong proses resolusi konflik.
3. *Separate causes from Consequences*, yaitu pemisahan antara sebab akar konflik dan akibat dari konflik.
4. *Separate goals from Interest*, yaitu sasaran selama proses konflik yang lebih spesifik. Sedangkan kepentingan adalah konsekuensi secara keseluruhan yang diinginkan dari hasil konflik oleh aktor konflik.
5. *Understand the Dynamics*, yaitu perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para aktor konflik.
6. *Search for Positive Functions*, yaitu menemukan bentuk perilaku yang memungkinkan konflik bisa mengarah pada penyelesaian.
7. *Understand the Regulation Potential*, yaitu bagaimana aturan legal seperti undang-undang dapat mengintervensi proses konflik.

Susan (2019) memberi pengantar dalam menganalisis dinamika konflik. Segala potensi yang diinginkan aktor yang berkonflik merupakan sumber konflik yang menjadi inti masalah konflik terjadi. Contohnya sumber daya alam, perbedaan tafsir agama, atau etnis. Setelah mengetahui sumber konfliknya, analisis karakter hubungan antara pihak berkonflik dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif sosiologi konflik, baik dengan positivis, kritis dan humanis. Ketiganya sendiri mengacu pada hubungan kekuasaan dalam dinamika konflik.

Untuk mempermudah mengetahui proses konflik yang terjadi Susan (2019) menjelaskan konteks hubungan kekuasaan analisis konflik untuk melihat penahapan konflik. Penahapan konflik meliputi kualitas dan kuantitas



tindakan diantara pihak berkonflik. Fisher (2001) dalam Susan (2019:82) menggambarkan penahapan dinamika konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis dan pasca konflik. Berikut adalah penjelasannya :

### 1. Prakonflik

Merupakan tahap awal konflik ketika terdapat ketidaksesuaian tujuan diantara aktor konflik. Konflik masih bersifat tersembunyi, meskipun masing-masing aktor mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Pada tahap ini terdapat ketegangan hubungan antara aktor yang berkonflik namun mereka menghindari kontak satu sama lain.

### 2. Konfrontasi

Di tahap ini konflik mulai terbuka sehingga muncul aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya dapat berpotensi lebih besar terjadi antara aktor yang berkonflik.

### 3. Krisis

Merupakan puncak konflik. Konflik mulai pecah menjadi bentuk-bentuk aksi kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus dan massal. Yang mengakibatkan menang atau kalah di salah satu pihak, bahkan bisa jadi kekalahan bersama. Situasi ini sangat bergantung dari proses penanganan konflik. Dengan melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (*problem solving*) mungkin konflik dapat berakhir dengan positif dan mengurangi kerugian akibat konflik. Namun tentunya akan berbeda jika strategi *contending* yang dipilih oleh aktor konflik, yang menyebabkan kerugian yang cukup besar. Tingkat kekerasan mulai menurun yang diikuti dengan penurunan konfrontasi sehingga mulai muncul inisiatif resolusi konflik.

#### 4. Pasca konflik

Situasi diselesaikannya konflik yang dilakukan dengan cara mengakhiri konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal antara pihak yang berkonflik.

Di samping itu, Susan (2019) lebih lanjut menjelaskan dengan menganalisis dinamika konflik, dapat ditemukan langkah yang digunakan untuk melakukan intervensi konflik. Menurut Moore (2003) dalam Susan (2019:83) intervensi berarti masuk ke dalam sistem hubungan yang sedang berlangsung, melakukan kontak diantara dua pihak atau beberapa pihak untuk membantu mereka. Saat intervensi berlangsung, sistem hubungan tersebut berjalan secara independen dari *intervenor*. Adapun beberapa bentuk dan tingkatan dalam intervensi konflik. Pertama, *peace making* (menciptakan perdamaian) menggunakan kekuatan militer dalam intervensinya. *Peace making* digunakan saat konflik berada pada puncak eskalasi konflik yang ditandai oleh aksi kekerasan, mobilisasi massa dan tidak adanya komitmen menghentikan konflik dari aktor yang terlibat konflik. Kedua, *peace keeping* (menjaga perdamaian) juga menggunakan kekuatan militer dengan tujuan menghentikan aksi kekerasan. Melemahnya aktor yang berkonflik juga dapat mengurangi kekerasan. Ketiga, *conflict management* (pengelolaan konflik) mulai dilakukan sebagai usaha pemecahan masalah dengan melibatkan pihak ketiga untuk mendapatkan pemecahan masalah. Contohnya berupa negosiasi, mediasi, penyelesaian jalur hukum (*judicial settlement*), arbitrase maupun *workshop* pemecahan masalah. Dan keempat, *peace building* (pembangunan perdamaian) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan rekonsiliasi pihak yang berkonflik.

Proses diatas merupakan bagian dari transformasi konflik, proses penanggulangan masalah dalam konflik yang meliputi sumber konflik dan konsekuensi negatif konflik. Proses transformasi konflik warga Asem Bagus yang memobilisasi kekerasan menyebabkan proses *peace building* terhambat. Dalam situasi ini intervensi pertama berupa *peace making* dengan tujuan

mencegah kekerasan pecah lagi. Namun *peace keeping* juga dianggap mampu menjaga perdamaian negatif, maka langkah selanjutnya dengan *conflict management*, yaitu mengelola konflik melalui politik negosiasi dan mediasi untuk mendapatkan pemecahan masalah konflik. Ketika pemecahan masalah telah didapatkan maka kesepakatan harus dapat dilakukan untuk membentuk *peace building* dalam masyarakat pasca konflik (Susan, 2019).

Setelah mengetahui proses dan dinamika konflik, selanjutnya peneliti melakukan kajian mengenai usaha penyelesaian konflik atau perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing aktor konflik. Dalam studi konflik, perdamaian dibagi menjadi tiga yaitu perdamaian positif, perdamaian negatif dan perdamaian menyeluruh. Salah satu kajian penyelesaian konflik atau menciptakan perdamaian yaitu pengelolaan konflik (*conflict management*). Perdamaian positif adalah kondisi dimana kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sudah terpenuhi. Sedangkan perdamaian negatif lebih terfokus pada tidak adanya kekerasan langsung, contohnya seperti perang. Berbagai usaha melakukan pencegahan munculnya kekerasan langsung dalam masyarakat biasanya dilakukan dalam bentuk pengelolaan konflik. Mediasi transformatif menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan konflik konstruktif. Pada dasarnya konflik yang berubah menjadi kekerasan atau perdamaian disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang menunjuk pada pihak-pihak berkonflik maupun faktor eksternal yang menunjuk pada penanganan konflik yang dilakukan oleh pihak luar yang berkonflik. Perdamaian menyeluruh adalah usaha menggabungkan perdamaian positif dan negatif, dengan menggabungkannya perdamaian menyeluruh berusaha mengontrol dan mengelola kehidupan secara berkelanjutan (Susan, 2019).

Menurut Sparringa (2019:8) terdapat empat hal yang perlu diperhatikan apabila kita hendak mengendalikan konflik: (1) sumber konflik (resources, values, ego); (2) kondisi-kondisi yang memperburuk konflik (misalnya: tidak adanya rasa saling percaya, pertentangan budaya, gaya berkomunikasi yang

berbeda); (3) perilaku konflik (misalnya: hadir tidaknya kemarahan dan kekusaran, saling menyalahkan, serangan terhadap individu secara pribadi, kekerasan); dan (4) tersedianya ketrampilan berkomunikasi pada mediator atau fasilitator (misalnya 3R—reflect, restate, reframe). Di samping itu, perlu diperhatikan apa saja yang dapat memperburuk dan menurunkan intensitas konflik.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe penelitian

Untuk memahami fenomena konflik, ada beberapa strategi penelitian kualitatif yang dijabarkan oleh Creswell (2014) yaitu, studi naratif, studi kasus, fenomenologi, grounded theory dan etnografi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi karena dianggap sesuai dengan fokus penelitian. Creswell membedakan etnografi menjadi 2 bentuk yang paling populer yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis adalah pendekatan yang populer digunakan oleh para antropolog budaya. Dijelaskan Creswell (2012:464) etnografi merefleksikan sikap tertentu yang diambil oleh peneliti terhadap individu yang sedang dipelajari.

Etnografi realis adalah pandangan obyektif terhadap situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, melaporkan secara obyektif mengenai informasi yang dipelajari dari para obyek penelitian di lokasi (Creswell, 2012:464). Adapun ciri dalam etnografi realis sebagai berikut: (1) Etnografer menceritakan penelitian dari sudut pandang orang ketiga, laporan pengamatan partisipan, dan pandangan mereka. Etnografer tidak menuliskan pendapat pribadinya dalam laporan penelitian dan tetap berada di belakang layar sebagai reporter yang meliput tentang fakta-fakta yang ada; (2) Peneliti melaporkan data obyektif dalam sebuah bentuk informasi yang terukur, tidak terkontaminasi oleh bias, tujuan politik, dan penilaian pribadi. Peneliti dapat menggambarkan kehidupan sehari-hari secara detail antara orang-orang yang diteliti. Etnografer juga menggunakan kategori standar untuk deskripsi

budaya (misalnya kehidupan keluarga, kehidupan kerja, jaringan sosial, dan sistem status); (3) Etnografer menghasilkan pandangan partisipan melalui kutipan yang diedit tanpa merubah makna dan memiliki kesimpulan berupa interpretasi dan penyajian budaya ( Creswell, 2012: 464).

Sedangkan etnografi kritis adalah jenis penelitian etnografi dimana penulis tertarik memperjuangkan emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat (Creswell, 2012:467). Peneliti kritis biasanya berfikir dan mencari melalui penelitian mereka, melakukan advokasi terhadap ketimpangan dan dominasi (Creswell, 2012:467). Sebagai contoh, ahli etnografi kritis meneliti sekolah yang menyediakan fasilitas untuk siswa tertentu, menciptakan situasi yang tidak adil di antara anggota kelas sosial yang berbeda, dan membiarkan diskriminasi gender. Komponen utama dari etnografi kritis adalah faktor-faktor seperti nilai orientasi, memberdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih, menantang status quo, dan kekhawatiran tentang kekuasaan dan kontrol (Creswell, 2012: 467). Adapun ciri dalam etnografi kritis sebagai berikut: (1) Menyelidiki masalah sosial kekuasaan, pemberdayaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dominasi, represi, hegemoni, dan korban; (2) Para peneliti melakukan etnografi kritis sehingga penelitian mereka tidak semakin meminggirkan individu yang sedang dipelajari. Dengan demikian, para penanya berkolaborasi, aktif berpartisipasi, dan bekerjasama dalam penulisan laporan akhir. Para peneliti etnografi kritis diharapkan untuk berhati-hati dalam memasuki dan meninggalkan tempat penelitian, serta memberikan *feedback*; (3) Para peneliti etnografi memberikan pemahaman secara sadar, mengakui bahwa interpretasi mencerminkan sejarah dan budaya kita sendiri. Interpretasi dapat hanya bersifat sementara dan tergantung bagaimana partisipan akan melihatnya; (4) Peneliti kritis memposisikan diri dan sadar akan peran mereka dalam penulisan laporan penelitian; (5) Posisi ini tidak netral bagi peneliti kritis, hal ini berarti bahwa etnografi kritis akan menjadi pembela perubahan untuk membantu mengubah masyarakat kita sehingga tidak ada

lagi yang tertindas dan terpinggirkan; (6) Pada akhirnya, laporan etnografi kritis akan menjadi multilevel, multimetode pendekatan untuk penyelidikan, penuh kontradiksi, tak terpikirkan, dan ketegangan (Creswell, 2012:467).

Dalam pandangan Duranti (1997:85), etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol dan sumber meterial, serta karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu. Pada dasarnya perhatian utama penelitian etnografi adalah tentang *the way of life* suatu masyarakat. Dalam hal ini penggunaan pendekatan etnografi dirasa cocok untuk mengetahui bagaimana konstruksi kepentingan partisipan konflik, serta mengungkapkan pengaruh konflik yang melibatkan warga Asem Bagus dan pengembang Apartemen Gunawangsa Tidar.

Selain itu, Koentjaraningrat (1985:3-4) memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai etnografi, dimana menurutnya bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah geografi, ekologi, atau wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsi, biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur kebudayaan, sesuai dengan tata urutan yang baku, yang disebut dengan kerangka etnografi.

Selain kerangka etnografi, terdapat pula karakteristik yang melekat pada etnografi. Karakteristik yang dimiliki etnografi di antaranya; *pertama*, menggali atau meneliti fenomena sosial. Dalam konteks ini, peristiwa yang terjadi didalam masyarakat tertentu dikaji secara mendalam. *Kedua*, data tidak terstruktur. Sebagai penelitian sosial dengan objek masyarakat tentu data yang bersumber dari masyarakat tidak dapat di ukur kepastiannya, dikarenakan data tersebut sebagai data empiris yang cenderung berbeda dalam persepsi antar personal dan kelompok sosial. *Ketiga*, kasus atau sampel sedikit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian etnografi menggunakan pendekatan induktif, artinya kesimpulan yang didapat didasarkan dari yang khusus menjadi umum. *Keempat*, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dan tindakan manusia (*human action*). Hal ini yang paling

menarik dari etnografi, yakni menarik kesimpulan atas sikap dan perilaku sosial suatu masyarakat (Atkinson dan Hammersley, 1994:250).

### 1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Asem Bagus, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Lokasi penelitian ini dipilih karena wilayah tersebut merupakan wilayah terdampak pembangunan jalan akses apartemen Gunawangsa Tidar, sehingga penting sekaligus menjadi fokus wilayah penelitian peneliti. Bagi etnografer, temuan penelitian tidak dapat dipisahkan dari lokasi tertentu (spesifik) dan lingkungan di mana data penelitian dikumpulkan. ‘Sebuah studi menjadi etnografi ketika peneliti lapangan menghubungkan fakta dengan latar belakang yang mendasari fakta yang terjadi terutama dalam kaitannya dengan kontintensi sejarah dan budaya’. Dengan kata lain, studi tidak akan dianggap etnografi jika mengabaikan konteks dan kondisi terkait di mana tindakan dan pernyataan orang yang diamati dan dicatat.

Selain itu, di Asem Bagus merupakan sebaran wilayah partisipan konflik. Pembentukan komunitas warga terdampak dimulai pada 18 september 2018 yaitu “Komunitas Perjuangan Korban (Warga Terdampak) Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar Surabaya” yang terdiri dari 45 orang dan dilegitimasi oleh seluruh ketua RT di wilayah RW 02 Asem Bagus Kelurahan Tembok Dukuh.

### 1.6.3 Metode Penentuan Subjek

Informan adalah orang yang menjadi sumber data atau informasi bagi peneliti kualitatif. Ada beberapa cara untuk menentukan informan dalam penelitian, yaitu orang yang bersangkutan harus memiliki pengalaman dan pengetahuan atas masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan supaya validitas data dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Informan penelitian meliputi beberapa macam, seperti informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dan informan tambahan yang dapat memberi informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005).

Dalam penelitian ini informan didapatkan dengan *nonprobability sampling*, yang artinya peneliti tidak memberi kesempatan yang sama terhadap setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi informan. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah *snowball*. Dari informan awal merekomendasikan orang lain untuk dijadikan informan selanjutnya oleh peneliti. Proses ini dilakukan sampai peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Peneliti telah memilih subjek penelitian yang dianggap dapat menjelaskan dan memberi informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Variasi dari subjek penelitian telah ditentukan oleh peneliti guna penyajian analisis penelitian yang holistik dari beberapa golongan masyarakat maupun aktor-aktor pada kategori tertentu. Subjek penelitian kemudian menjelaskan informasi sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing, peneliti akan berhenti mencari subjek penelitian ketika informasi yang didapat sudah dalam kondisi jenuh, atau sudah tidak ada variasi informasi lagi.

Subjek yang terpilih tersebut adalah pihak yang mengetahui awal mula konflik yang terjadi antara warga Asem Bagus dan Apartemen Gunawangsa, serta mengerti perkembangan konfliknya hingga saat ini. Adapun informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Eko Kurniawan Purnomo, S.STP., M.Si merupakan kepala Kecamatan Bubutan. Subjek ini merupakan kepala Kecamatan Bubutan yang menjabat di tahun 2017 yang merupakan pengganti camat sebelumnya Bapak Drs. Chairul Anwar, M.Si. Peneliti memilih Bapak



Eko sebagai informan karena beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menjabat sebagai kepala kecamatan di wilayah peneliti melakukan penelitian ini. Selain itu, beliau juga mengetahui permasalahan konflik warga Asem Bagus dan Apartemen Gunawangsa Tidar yang sudah terjadi sejak 2015. Beberapa waktu setelah menjabat sebagai kepala Kecamatan Bubutan, beliau sudah ikut melakukan negoisasi atas konflik yang terjadi. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.

2. Bapak Moh. Imron, S.H. merupakan kepala Kelurahan Tembok Dukuh yang menjabat sejak tahun 2018. Peneliti memilih bapak Imron sebagai informan subjek dikarenakan beliau sebagai kepala kelurahan yang merupakan posisi paling dekat dengan warga di wilayah peneliti melakukan penelitian. Beliau merupakan pengganti dari kepala kelurahan bapak H. Dwi Mulyo Agustiarso, S.Sos., MM. yang sebelumnya telah membentuk tim bersama dengan Apartemen Gunawangsa Tidar yang dinamai tim 7. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.
3. Ibu Nurlaila Lakuary, SP. merupakan sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh. Peneliti memilih ibu Nurlaila sebagai informan subjek dikarenakan beliau yang mengurus kebutuhan relokasi warga Asem Bagus Gang Pancasila ke Rusunawa Romokalisari. Beliau juga ikut dalam pertemuan antara warga Asem Bagus dan pengembang Apartemen Gunawangsa Tidar ketika mencari solusi terkait konflik yang terjadi. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.
4. Bapak Drs. Ec. H. Sumardi, MM merupakan wakil ketua tim 7 yang juga merupakan ketua RW 02 Asem Bagus. Beliau merupakan warga yang telah tinggal lama di Asem Bagus. Bapak Sumardi berasal dari Makassar kemudian pindah dan menetap di Kelurahan Tembok Dukuh. Bapak Sumardi juga merupakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS)

dilingkungan Pemkot Surabaya. Sebagai wakil ketua tim 7 yang juga ketua RW, beliau bertugas menjembatani komunikasi antara warga dan pengembang apartemen Gunawangsa Tidar. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.

5. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. merupakan mantan ketua Komunitas Perjuangan Korban (warga terdampak) Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum UNAIR dan juga ikut menolak pembangunan jalan akses apartemen Gunawangsa Tidar. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai ketua komunitas warga, namun informasi yang di dapat akan memperkaya data peneliti. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.
6. Bapak Abdul Aziz merupakan ketua Komunitas Perjuangan Korban (warga terdampak) Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar dan merupakan salah satu warga yang dilaporkan oleh pengembang apartemen kepada kepolisian. Bapak Aziz memiliki toko yang berada di depan proyek pembangunan jalan akses apartemen. Beliau yang telah tinggal lama di wilayah Asem Bagus memahami konflik yang telah terjadi sejak 2015 hingga sekarang. Bapak Aziz terus menyuarakan aspirasinya yang kemudian dibawanya ke LBH Surabaya. Sehingga informasi dari beliau akan memperkaya data penelitian. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.
7. Bapak Slamet Budi Utomo merupakan warga Asem Bagus Gang Pancasila yang telah direlokasi ke rusunawa Romokalisari. Dalam kesehariannya beliau berdagang makanan dan minuman di sekitar Asem Bagus. Saat ini bapak Slamet tinggal di rusunawa dan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk membuka warung yang dimilikinya. Dalam bekerja beliau juga ditemani oleh istri dan anaknya. Beliau juga memahami awal mula konflik yang terjadi sehingga data

yang didapat akan memperkaya data penelitian peneliti. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.

8. Bapak Mudjiman adalah sekretaris Komunitas Perjuangan Korban (warga terdampak) Pembangunan Apartemen Gunawangsa Tidar yang juga merupakan warga Asem Bagus RT . Beliau juga salah satu warga yang dilaporkan pengembang kepada kepolisian. Beliau telah lama tinggal di Asem Bagus dan memahami konflik yang terjadi. Selain itu, peneliti juga mendapatkan rekomendasi untuk dapat menemui informan-informan lainnya. Sehingga informasi dari beliau akan memperkaya data penelitian. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.
9. Bapak Djuanda merupakan Wakil Management Building Apartemen Gunawangsa Tidar. DJ memang tidak tinggal di wilayah Asem Bagus, namun sebagai wakil management building beliau memahami pembangunan apartemen dan seluk beluk isu konflik pembangunan jalan akses apartemen Gunawangsa Tidar. Sehingga informasi dari beliau akan memperkaya data penelitian. Dengan pertimbangan inilah peneliti memilih beliau sebagai informan subjek.

#### 1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Creswell (2014) menjelaskan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data diawali dengan identifikasi lokasi dan individu yang sengaja dipilih dalam penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Sumber data primer dan metode pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Observasi partisipan, konteks ini berkaitan dengan fokus peneliti pada diri sendiri secara keseluruhan dalam situasi sosial, sehingga diharapkan peneliti akan lebih dekat dengan informan yang ditelitinya. Selain itu, peneliti juga sangat dianjurkan untuk melakukan pertimbangan atas perilaku sosial, termasuk didalamnya pengetahuan sosial, dimana hal itu

sebagai penguat dan penjelas.. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui, memetakan dan melihat konflik antara warga Asem Bagus dan apartemen Gunawangsa Tidar yang sedang terjadi. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Sedangkan wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. Dengan wawancara pula data secara langsung peneliti peroleh dari informan-informan yang peneliti peroleh tersebut. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan alat rekam (*recorder*) sebagai instrumen dalam memandu peneliti agar tetap berada dalam lingkup topik yang peneliti tetapkan dan menjaga data dialog percakapan hasil wawancara yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini informan mengenai konflik warga Asem Bagus dalam kasus pembangunan jalan akses apartemen Gunawangsa Tidar. Berbagai data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara kemudian dilakukan perekaman atas data tersebut yang disesuaikan dengan jenis dan bentuknya. Perekaman data dapat dilakukan dengan bentuk catatan lapangan, foto, video, serta cara lainnya yang dapat membantu peneliti dalam menganalisisnya. Dokumentasi visual juga turut peneliti gunakan sebagai teknik pengumpulan data, guna melihat gejala-gejala yang berupa bentuk fisik seperti spanduk-spanduk penolakan dan lainnya.

#### 1.6.5 Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dilakukan secara simultan. Tahapan dalam analisis data melalui empat bentuk, yakni; analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau pengertian menyeluruh tentang objek penelitian (situasi sosial); analisis taksanomi digunakan untuk menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya; analisis komponensial digunakan untuk melakukan wawancara atau pengamatan terpilih agar memperdalam data melalui pengajuan pertanyaan yang kontras antar elemen dalam suatu

domain; dan analisis tema kultural yang digunakan untuk melakukan pencarian kesimpulan antara domain untuk memperoleh tema-tema tertentu, seperti nilai-nilai, premis, etos, pandangan dunia, ataupun orientasi kognitif (Jonathan, 2006:263).

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menuliskan catatan singkat sepanjang penelitian. Creswell (2014) mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara bersamaan. Ketika wawancara berlangsung, peneliti dapat melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dengan menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir.

Membaca keseluruhan data atas informasi yang diperoleh kemudian peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat interpretatif, yaitu menggunakan pemikiran dari pihak-pihak yang saling berkaitan dengan subjek penelitian. Pemikiran dari subjek penelitian yang didapatkan dari wawancara mendalam akan ditranskripsikan dalam bentuk teks sebagai bahan analisis data. Peneliti menyajikan data yang disampaikan informan, kemudian dijelaskan dan dianalisis dengan diskusi teoritik sehingga nantinya memenuhi kaidah-kaidah penelitian ilmiah dalam bidang teori ilmu sosial.

Penulisan laporan etnografi, kegiatan ini menjadi tugas akhir dalam penelitian etnografi. Pada dasarnya penelitian etnografi melibatkan suatu *open-ended enquiry*, dimana mungkin saja peneliti diharuskan mengadakan analisis yang lebih intensif jika pada saat menulis laporan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan observasi

lanjutan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa potongan dari transkrip wawancara yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan penyajian data, diharapkan agar pembaca lebih mudah memahami apa yang terjadi. Sajian data tersebut nantinya digunakan peneliti untuk menarik kesimpulan sehingga pembaca bisa mengerti apa yang telah dijelaskan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Sehingga akhirnya peneliti menyimpulkan penelitiannya dalam bentuk kesimpulan.